II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

1.1. Teori Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Eni Febriana, 2010: 25). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mempu lagi menangani kemiskinan.

Paradima neo-liberal ini digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini. Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu negara.

2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural (Cheyne, O'Brien dan Belgrave dalam Eni Febriana, 2010 : 29). Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif.

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan.

Disinilah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

1.2. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan sendiri memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau kelompok. Indikator itu sendiri adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Eni Febriana, 2010 : 27). Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu.

2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbataan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan dan kurangnya pendapatan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, kecilnya upah pekerja, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
5. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
6. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
7. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam.

Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.

8. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
9. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
10. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

1.3. Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh *Chambers* (dalam Sasumbar Saleh 2002:46) menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi.

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah . Konsumsi ini terutama ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

1. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular.
2. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian
3. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.
4. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas).

Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah.

1.4. Ukuran Kemiskinan

Menurut William A (dalam Rahmawati Futurrohmin 2011 :14) kemiskinan adalah konsep yang relatif, bagaimana cara kita mengukurnya secara obyektif dan bagaimana cara kita memastikan bahwa ukuran kita dapat diterapkan dengan tingkat relevasi yang sama dari waktu ke waktu.

Untuk mengukur kemiskinan ada tiga indikator yang diperkenalkan dalam Foster dkk (dalam Tambunan 2003: 96) yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris. Pertama, *the incidence of poverty* : persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Kedua, *the depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan *poverty gap index*. Ketiga, *the severity of poverty* yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin, dengan demikian kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering

disebut sebagai garis batas kemiskinan. (Todaro,1997 dalam Lincolin Arsyad 2004:238).

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Miller dalam Lincolin Arsyad (2004:239) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin.

Maka ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Ukuran kemiskinan juga bisa dihitung melalui pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan untuk mengukur kemiskinan ini mengasumsikan bahwa seseorang dan rumah tangga dikatakan miskin jika pendapatan atau konsumsi minimumnya berada di bawah garis kemiskinan. Ukuran-ukuran kemiskinan ini dihitung melalui (Coudouel, et.al, 2001 dalam Akhmad Daerobi 2007 8:9) adalah:

1. *Head Count Index* , menghitung presentase orang yang ada di bawah garis kemiskinan dalam kelompok masyarakat tertentu.
2. Indeks Keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index)* yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), mengukur besarnya distribusi pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan. Pembilang pada pendekatan ini menunjukkan jurang kemiskinan (poverty gap), yaitu penjumlahan (sebanyak individu) dari kekurangan pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan penyebut adalah jumlah individu di dalam perekonomian (n) dikalikan dengan nilai garis kemiskinan, dengan ukuran ini, tingkat keparahan kemiskinan mulai terakomodasi. Ukuran kemiskinan akan turun lebih cepat bila orang-orang yang dientaskan adalah rumah tangga yang paling miskin dibandingkan bila pengentasan kemiskinan terjadi pada rumah tangga miskin yang paling tidak miskin.

1.5. Kriteria Kemiskinan

Ada berbagai macam kriteria yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, salah satunya kreteria miskin menurut Sayogyo. Komponen yang digunakan sebagai dasar untuk ukuran garis kemiskinan Sayogyo adalah pendapatan keluarga yang disertakan dengan nilai harga beras yang berlaku pada saat itu dan rata anggota tiap rumah (lima orang) Berdasarkan kriteria tersebut, Sayogyo (1978 : 34) membedakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok yaitu :

1. Sangat Miskin

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya dibawah setara 250 kg beras ekuivalen setiap orang dalam setahun penduduk yang tinggal diperkotaan.

2. Miskin

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapatan setara dengan 240 kg beras sampai 320 kg beras selama setahun untuk penduduk yang tinggal didesa, dan 360 kg beras sampai 480 kg beras pertahun untuk tinggal diperkotaan.

3. Cukup

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya setara dengan lebih dari 480 kg beras setiap orang dalam setahun untuk penduduk yang tinggal dipedesaan, dan di atas 720 kg beras setiap orang pertahun untuk yang tinggal diperkotaan.

Sedangkan kreteria penduduk miskin Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga dikatakan miskin (BPS, 2008:17), apabila:

1. Luas lantai hunian kurang dari 8 m² per anggota rumah tangga.
2. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya.
3. Fasilitas air bersih tidak ada.
4. Fasilitas jamban atau WC tidak ada.
5. Kepemilikan aset tidak tersedia.
6. Konsumsi lauk-auk dalam seminggu tidak bervariasi.
7. Kemampuan membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun tidak ada.
8. Pendapatan (total pendapatan per bulan) kurang dari atau sama dengan Rp 350.000,-

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah pertambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Menurut Todaro dan Smith dikutip oleh Merna Kumalasari (2006: 85) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni :

a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.

b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama

c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi kita dapat menggunakan jumlah PDRB tiap tahun sebagai indikatornya. Pengertian PDRB sendiri menurut Badan Pusat Statistik (2004:8) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Dimana PDRB merupakan data yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*cateris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2003:40-

41). Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut penelitian Hermanto Siregar dan Dwi W (2008:34) dari hasil penelitian tersebut menunjukan hasil yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin, artinya bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

4. Angka Harapan Hidup

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktifitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Indonesia sebagai contoh tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja

laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya anak yang sehat akan mempunyai kemampuan belajar yang lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan cenderung tidak akan terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat.

Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan penting untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur tingkat kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (BPS, 2008:10). Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis

mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung, dengan demikian tabungan nasional dan investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan kemiskinan.

5. Hubungan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi. Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada penduduk miskin adalah: pertama, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. Kedua, penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit.

Konsekuensi ekonomi jika terjadi serangan penyakit pada anggota keluarga merupakan bencana jika biaya penyembuhannya mengharuskan menjual asset yang mereka miliki atau berhutang. Hal ini akan menyebabkan keluarga jatuh dalam kemiskinan dan jika bisa keluar dari hal ini akan mengganggu tingkat kesejahteraan seluruh anggota keluarga bahkan generasi berikutnya.

Serangan penyakit yang tidak fatal dalam kehidupan awal akan mempunyai pengaruh yang merugikan selama siklus hidup berikutnya. Pendidikan secara luas dikenal sebagai kunci dari pembangunan, tetapi belum dihargai betapa pentingnya kesehatan dalam pencapai hasil pendidikan. Kesehatan yang buruk secara lagsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat memelaratkan keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup dan menurunnya kesejahteraan psikoligis.

Inilah yang menjadikan kesehatan memiliki korelasi penting terhadap kemiskinan. Hal ini sependapat dengan penelitian Bimo Rizki dan Samsubar Saleh (2007: 98) konsep pembangunan manusia juga merupakan konsep ekonomi, karena salah satu strategi dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan mutu modal manusia melalui kesehatan, pendidikan dan rasa aman.

6. Angka Melek Huruf

Angka Melek huruf merupakan salah satu indikator pendidikan. Kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga angka melek huruf akan semakin meningkat. Sebaliknya negara-negara yang kemiskinannya masih tinggi akan selaras dengan sumber daya manusia yang tingkat pendidikannya masih rendah. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin meningkat produktifitas orang tersebut sehingga akan meningkatkan pendapatan baik individu maupun nasional. Peningkatan pendapatan

individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi, sehingga mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan merupakan sarana untuk menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan. Namun ironisnya, pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga realitas.

Pertama, kepedulian pemerintah yang bisa dikatakan rendah terhadap pendidikan yang harus kalah dari urusan yang lebih strategis yaitu politik. Bahkan pendidikan dijadikan jargon politik untuk menuju kekuasaan agar bisa menarik simpati di mata rakyat.

Kedua, penjajahan terselubung. Pada era globalisasi dan kapitalisme ini, ada sebuah penjajahan terselubung yang dilakukan oleh negara-negara maju dari segi kapital dan politik yang telah mengadopsi dari berbagai dimensi kehidupan di negara-negara berkembang. Umumnya, penjajahan ini tentu tidak terlepas dari unsur ekonomi.

Dengan hutang negara yang semakin meningkat, beban atau organisasi donor pun mengintervensi secara langsung maupun tidak terhadap kebijakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya terjadilah privatisas disegala bidang. Bahkan pendidikan pun tidak luput dari usaha privatisasi ini, dari sini pendidikan semakin mahal yang tentu tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Akhirnya rakyat tidak bisa lagi mengenyam pendidikan

tinggi dan itu berakibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga tidak heran jika tenaga kerja di Indonesia bayak yang berada disektor informal akibat kualitas sumberdaya manusia yang rendah, dan disalah satunya karena biaya pendidikan yang mahal.

Ketiga adalah kondisi masyarakat sendiri yang memang tidak bisa mengadaptasikan diri dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini tidak terlepas dari kondisi bangsa yang tengah dilanda krisis multidimensi sehingga harapan rakyat akan kehidupannya menjadi rendah. Hal ini akan berdampak pada kekurangannya respek terhadap terhadap dunia pendidikan, karena lebih mementingkan urusan perut dari pada sekolah. Akibatnya kebodohan akan menghantui, dan kemisknan pun akan mengiringi. Sehingga kemiskinan menjadi sebuah reproduksi sosial, dimana dari kemiskinan akan melahirkan generasi yang tidak terdidik akibat kurangnya pendidikan dan kemudian menjadi bodoh serta kemiskinanpun kembali menjerat.

7. Hubungan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, karena pendidikan merupakan kunci dalam membentuk kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi yang modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercapai pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Namun tidak bisa ditampik bahwa bagi sebagian besar bangsa Indonesia pendidikan masih merupakan barang mewah. Diatas pendidikan bangsa Indonesia ini masih pusing memikirkan kesulitan hidup, terutama ekonomi. Selain karena faktor ekonomi yang belum aman, sekolah juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga masih rendah, hal ini dikarenakan pandangan tentang pendidikan itu sendiri. Pandangan seseorang dipengaruhi oleh lingkup pengalaman dan lingkup kebudayaanya. Contoh sederhana misalnya berapa banyak pengaruh pendidikan terhadap tingkat keberhasilan orang menjadi kaya. Tampaknya kesan masyarakat terhadap kesuksesan dan kekayaan tidak berkorelasi dengan pendidikan terutama bagi masyarakat pedesaan, mereka berpandangan bahwa untuk menjadi kaya tidak perlu berpendidikan tinggi melainkan bekerja keras dan keuletan dalam berdagang. Hal ini merupakan salah satu penyebab masih rendahnya Angka Melek Huruf di Indonesia. Melek huruf merupakan salah satu indikator pendidikan.

Kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga angka melek huruf akan semakin meningkat. Sebaliknya negara-negara yang kemiskinannya masih tinggi akan selaras dengan sumber daya manusia yang tingkat pendidikannya masih rendah.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin meningkat produktifitas orang tersebut sehingga akan meningkatkan pendapatan baik individu maupun nasional. Peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi, sehingga mengentaskan mereka dari kemiskinan. Sebagaimana telah dibuktikan dalam penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008 : 23-40) investasi pendidikan berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rasidin K Sitepu dan Bonar M Sinaga (2005 : 117-125) investasi pendidikan bermanfaat besar bagi pengurangan kemiskinan.

8. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial.

Program penanggulangan masalah kemiskinan ini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik.

Tabel 7. Pos Pengeluaran Pemerintah Untuk Investasi Sumber Daya Manusia dan Investasi Fisik

Investasi Sumber Daya Manusia	Investasi Fisik
1. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga 2. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja 3. Agama 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Industri 2. Pertanian dan Kehutanan 3. Sumber Daya Air dan Irigasi 4. Tenaga Kerja 5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah, dan Koperasi 6. Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika 7. Pertambangan dan Energi 8. Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi 9. Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 10. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 11. Kependudukan dan Keluarga Berencana 12. Perumahan dan Pemukiman 13. Hukum 14. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan 15. Politik, Penerangan, Komunikasi,dan Media Massa 16. Keamanan dan Ketertiban Umum 17. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dan anak-anak, pengembangan kualitas tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruh aspek di bidang sumber daya manusia di atas merupakan salah satu syarat dasar dalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan ke dalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisik pemerintah ini adalah keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia.

9.Hubungan Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan komponen yang diperlukan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran pada kedua sektor ini dilakukan pemerintah dalam merespon dua indikator kemiskinan yaitu keterbatasan di sektor kesehatan dan keterbatasan di sektor pendidikan, yang mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas nantinya akan mampu bersaing dan membawa pembangunan ekonomi kearah yang lebih maju, sehingga pada akhirnya pembangunan ekonomi yang maju tersebut akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

B. Tinjauan Empiris

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005) dengan judul “Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computebel General Equilibrium” Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak investasi sumber

daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Metode untuk menjawab tujuan penelitian ini disebut sebagai metode *ad-hoc*, yaitu solusi dari suatu pendekatan merupakan *input* bagi pendekatan lainnya, tetapi secara keseluruhan pendekatan ini lebih menggunakan *computable general equilibrium model* (CGE) yang diadopsi dari model INDOF (Oktaviani, 2000). Penulisan notasi dalam model ini mengikuti sistem model ORANI-F (Horridge *et al.,* 1993) dan INDOF (Oktaviani, 2000), yang dituliskan dalam istilah perubahan persentase. Model CGE dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa seluruh industri beroperasi pada pasar dengan kondisi *competitive* baik di pasar *input* maupun di pasar *output*. Hal ini mengimplikasikan bahwa tidak ada pelaku ekonomi yang dapat mengatur pasar sehingga seluruh sektor dalam ekonomi diasumsikan menjadi penerimaan harga (*price-taker*). Pada tingkat *output*, harga-harga yang dibayar oleh konsumen sama dengan *marginal cost* dari memproduksi barang. Hal yang sama, *input* dibayar sesuai dengan nilai produk marginalnya. Persamaan permintaan dan penawaran diturunkan dari prosedur optimasi. Karena model yang digunakan merupakan model *recursive dynamic*, dampak kebijakan dari tahun ke tahun dapat tertangkap dari model. Dalam kajian ini simulasi kebijakan dianalisis dalam lima tahun ke depan.

2. Samsubar Saleh (2002) dengan judul penelitian ”Faktor-faktor Penentu Kemiskinan Regional Di Indonesia” Berdasarkan hasil-hasil empirik dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia

(terdiri dari pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadp fasilitas kesehatan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, dan krisis ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah berikut ini. Pertama, peningkatan kualitas pengembangan manusia melalui peningkatan pendapatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kedua, di saat bersamaan dilakukan kebijakan yang dapat mendukung pemerataan pendapatan. Ketiga, investasi fisik dilakukan secara merata dengan prioritas pada kawasan-kawasan padat keluarga miskin. Keempat, pemerataan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor informal ekonomi dan politik, sektor di mana sebagian besar keluarga miskin berasal.

3. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dengan judul "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Metode analisis deskriptif dan ekonomertika menggunakan data panel yaitu data *time series* dari tahun 1995-2005 dan *cross section* dari 26 provinsi (sebelum pemekaran-pemekaran dan setelah disitegrasi Timor Timur. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh angka kemiskinan di atas 20 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi belum berhasil dikurangi bahkan cenderung

meningkat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitude yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, share sektor pertanian, dan sektor industri. Namun variabel yang signifikan dan relatif besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin adalah sektor pendidikan.